



## Akseptasi Program MBG di SDI Gere dalam Lensa Hak Individu Ockham

Melpin M. Uropdana<sup>1\*</sup>, Yosef Mariano Payong<sup>2</sup>, Gregorius Dosi Kote<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Program Studi Filsafat, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [mebouropdana@gmail.com](mailto:mebouropdana@gmail.com)

**Abstract.** *This study explores the acceptance of the Free Nutritious Meal Program (MBG) at SD Inpres Gere through William of Ockham's negative rights framework, focusing on freedom from external interference. As a positive rights policy (the right to services), the MBG has the potential to conflict with the principles of individual subjective rights (negative rights). Ockham emphasized that every individual has a personal sovereignty that must be free from interference from external authorities. Using qualitative research methods through literature studies and interviews, this article analyzes the risk of standardizing consumption that can reduce individual autonomy in determining their private needs. The analysis shows that although the MBG has a noble aim to fulfill the right to life, its implementation risks becoming a form of state paternalism that harms citizens' negative freedoms if not accompanied by strict limits on power. This paper concludes that to align with Ockham's principle of individual subjective rights, the MBG program must continue to respect the private space and diversity of individual choices without creating dependency that erodes the sovereignty of legal subjects.*

**Keywords:** *Free Nutritious Food; Individual Liberty; Negative Rights; Primary School; William Ockham.*

**Abstrak.** Penelitian ini mengeksplorasi akseptasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Inpres Gere melalui kerangka pemikiran hak negatif William of Ockham dengan fokus pada kebebasan dari campur tangan pihak luar. Sebagai kebijakan yang bersifat hak positif (hak atas layanan), MBG berpotensi berbenturan dengan dengan prinsip-prinsip hak subjektif individu (hak negatif). Ockham menekankan bahwa setiap individu memiliki wilayah kedaulatan pribadi yang harus bebas dari intervensi otoritas eksternal. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi literatur dan pendekatan wawancara, artikel ini menganalisis risiko penyeragaman konsumsi yang dapat mereduksi otonomi individu dalam menentukan kebutuhan privatnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun MBG bertujuan mulia untuk memenuhi hak hidup, pelaksanaannya berisiko menjadi bentuk paternalisme negara yang mencederai kebebasan negatif warga jika tidak disertai batasan kekuasaan yang ketat. Tulisan ini menyimpulkan bahwa agar selaras dengan prinsip hak subjektif individu Ockham, program MBG harus tetap menghormati ruang privat dan keragaman pilihan individu tanpa menciptakan ketergantungan yang mengikis kedaulatan subjek hukum.

**Kata kunci:** Hak Negatif; Kebebasan Individu; Makanan Bergizi Gratis; Sekolah Dasar; William Ockham.

### 1. LATAR BELAKANG

Pemenuhan gizi bagi tubuh sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan hidup manusia. Pemenuhan tersebut sebagian besar berasal dari pola konsumsi manusia itu sendiri. Kepenuhan atau terjaminnya gizi berdampak positif pula terhadap aspek intelektual manusia. Socrates yakin kehidupan yang baik bersumber dari pikiran yang baik, yang didukung oleh tubuh yang sehat. Dalam Republik karya Plato, Socrates menekankan pentingnya makanan yang bergizi namun wajar (tidak berlebihan) untuk menjaga kejernihan berpikir (Theo, 2023). Oleh sebab itu, asupan gizi merupakan salah satu unsur penting yang perlu diperhatikan demi pertumbuhan dan perkembangan hidup manusia, termasuk aspek intelektual.

Implementasi program Makanan Bergizi Gratis (MBG) oleh Prabowo-Gibran merupakan upaya untuk menjamin pemenuhan gizi para pelajar, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui demi mengintensifkan fokus belajar, kesehatan, dan aspek intelektual. Tujuan utama program MBG adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia melalui perbaikan gizi untuk menekan angka stunting. Selain itu, MBG bertujuan menggerakkan ekonomi lokal melalui pemanfaatan bahan pangan. Dengan demikian program MBG tidak hanya berdampak positif pada aspek pendidikan dan kesehatan semata, tetapi juga terhadap aspek ekonomi masyarakat, terutama para petani (Badan Gizi Nasional, 2025).

Meskipun program MBG memiliki tujuan mulia, dalam pelaksanaan program tersebut ada konsekuensi-konsekuensi tertentu yang berdampak negatif terhadap masyarakat dan negara. Atau kemungkinan-kemungkinan negatif lain yang dapat terjadi jika pengelolaannya tidak efektif dan proporsional. Konkretnya, akumulasi sumber pendanaan program MBG berasal dari efisiensi anggaran instansi-instansi pemerintah sehingga konsekuensinya instansi-instansi tersebut mengalami defisit anggaran. Efisiensi anggaran tersebut memungkinkan beberapa program instansi pemerintahan tidak dapat direalisasikan yang berujung pada tertutupnya akses pelayanan publik tertentu. Contoh riilnya ialah risiko pengalihan anggaran pendidikan secara masif dalam jumlah besar kepada program MBG dapat menghambat perbaikan sekolah rusak atau sertifikasi guru. Pada sektor kesehatan, anggaran kesehatan yang cenderung stagnan atau mengalami penyusutan dikhawatirkan akan terdampak realokasi dana untuk pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan (Askar et al., 2025).

Jika dikaitkan dengan penelitian sebelumnya, kajian tentang program MBG umumnya masih berfokus pada aspek kebijakan sosial, kesehatan masyarakat, dan dimensi politik negara. Misalnya, penelitian Kiftiyah dkk. Kiftiyah et al. (2025) menekankan MBG dalam perspektif keadilan sosial dan dinamika politik, sementara Keladu et al. (2026) melihatnya sebagai instrumen kebijakan negara yang juga berkaitan dengan legitimasi kekuasaan serta kesejahteraan publik. Selain itu, penelitian di bidang kesehatan masyarakat seperti Hastuti dan Hariyadi lebih menyoroti dampak MBG terhadap peningkatan status gizi, pencegahan malnutrisi, dan kesehatan anak sekolah (Hastuti & Mahardika, 2025). Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik membahas MBG dalam kerangka filsafat hak, khususnya pemikiran hak negatif William of Ockham. Oleh karena itu, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang signifikan, yaitu belum adanya kajian yang menilai batas intervensi negara dalam MBG dari sudut pandang kebebasan individu dan perlindungan hak dasar. Penelitian ini kemudian hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis

MBG tidak hanya sebagai kebijakan sosial-politik dan kesehatan, tetapi juga sebagai isu etis-filosofis terkait batas kewenangan negara dalam perspektif hak negatif.

Artikel ini bertujuan menganalisis akseptasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Gere melalui kacamata hak individu menurut Ockham, yang berfokus pada otonomi subjek dan hak alamiah. Studi ini mengevaluasi apakah kebijakan tersebut menghormati kebebasan individu atau justru menjadi bentuk intervensi negara yang dominan, sambil memberikan masukan kritis bagi implementasi kebijakan nasional.

## 2. KAJIAN TEORITIS

William of Ockham merupakan tokoh filsafat politik abad pertengahan yang menekankan bahwa manusia memiliki hak alamiah yang melekat secara kodrati, termasuk kebebasan pribadi, hak milik, dan perlindungan dari campur tangan negara yang berlebihan. Dalam perspektif Ockham, hak negatif adalah hak individu untuk bebas dari intervensi eksternal yang tidak adil, sehingga negara wajib membatasi kekuasaannya demi menjaga martabat dan kebebasan manusia (Handoyo et al., 2024). Menurut Ockham, legitimasi negara tidak bersifat absolut. Negara hanya dapat dibenarkan apabila kebijakan yang dijalankan bertujuan pada kesejahteraan umum (*bonum commune*) tanpa melanggar hak dasar warga negara (Marsela et al., 2024). Oleh karena itu, teori hak negatif menuntut keseimbangan antara otoritas negara dan kebebasan individu. Dalam konteks kebijakan modern, teori ini relevan untuk menilai program sosial negara yang dibiayai melalui pajak, termasuk program MBG, karena kebijakan tersebut melibatkan intervensi negara terhadap sumber daya masyarakat. Program MBG telah menjadi perhatian dalam berbagai penelitian di Indonesia, terutama dalam bidang kesehatan masyarakat, kebijakan publik, dan pembangunan sosial. Sebagian besar penelitian terdahulu menitikberatkan pada efektivitas program dalam meningkatkan kualitas gizi anak, menurunkan angka stunting, serta mendukung pembangunan sumber daya manusia nasional.

Penelitian dalam bidang kesehatan masyarakat menunjukkan bahwa program MBG di sekolah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan status gizi peserta didik, pencegahan malnutrisi, serta penguatan kesehatan fisik anak. Studi *literature review* yang dilakukan oleh Hastuti & Mahardika (2025) menegaskan bahwa intervensi nutrisi melalui penyediaan makanan bergizi di lingkungan pendidikan merupakan strategi preventif yang efektif dalam menurunkan risiko kekurangan gizi dan mendukung perkembangan optimal anak usia sekolah. Program ini juga dinilai mampu meningkatkan konsentrasi belajar, kualitas pertumbuhan, dan

pembangunan sumber daya manusia sejak dini. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa efektivitas program MBG sangat ditentukan oleh mutu nutrisi makanan yang diberikan, standar keamanan konsumsi, pemerataan distribusi kepada seluruh sasaran, serta sistem evaluasi yang konsisten. Oleh karena itu, MBG tidak sekadar diposisikan sebagai program bantuan sosial, melainkan juga sebagai bagian dari kebijakan kesehatan publik yang berperan dalam menjamin pemenuhan hak anak terhadap akses makanan sehat, aman, dan bernutrisi.

Dalam bidang politik hasil penelitian menunjukkan bahwa program MBG tidak hanya diposisikan sebagai kebijakan sosial, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam agenda politik nasional, terutama dalam konteks legitimasi pemerintahan, keadilan sosial, dan pembangunan citra negara kesejahteraan. Studi oleh Kiftiyah et al. (2025), dalam *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* menegaskan bahwa MBG merupakan bagian dari implementasi prinsip keadilan sosial Pancasila, dengan tujuan memperluas kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan akses pangan bergizi. Namun, penelitian ini juga menyoroti bahwa program tersebut menghadapi tantangan politisasi, distribusi anggaran, dan dinamika kekuasaan yang dapat memengaruhi efektivitas kebijakan. Selain itu, Keladu et al. (2026) dalam *Politeia: Jurnal Ilmu Politik* menganalisis MBG melalui perspektif teori kapabilitas Amartya Sen dan menemukan bahwa meskipun program ini memiliki orientasi kesejahteraan publik, terdapat risiko bahwa MBG lebih berfungsi sebagai simbol politik populis jika tidak disertai pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kebebasan individu secara struktural. Dengan demikian, dalam kerangka politik, MBG dipahami sebagai kebijakan yang berada di persimpangan antara kepentingan kesejahteraan rakyat, strategi elektoral, serta legitimasi kekuasaan pemerintah.

Kajian tentang program MBG umumnya masih berfokus pada aspek kebijakan sosial, kesehatan masyarakat, dan dimensi politik negara. Oleh sebab itu, artikel ini hendak mengkaji program MBG dalam perspektif filsafat Ockham perihal hak individu untuk bebas dari intervensi eksternal yang tidak adil. MBG diprogramkan oleh pemerintah tanpa konsensus individu-individu tertentu yang menjadi sasarannya secara komprehensif. Tidak semua kaum sasaran yang menyetujui atau menerima program tersebut seperti para pelajar di Deiyai, Papua Tengah, yang mengadakan demonstrasi damai menolak MBG dan menganjurkan pendidikan gratis sebagai solusinya (Jubi, 2025). Tulisan ini hendak mengkaji respon dan akseptasi terhadap program MBG oleh pihak SD Inpres Gere, Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan kaitannya dengan hak negatif individu Ockham.

### 3. METODE PENELITIAN

Dalam menyelesaikan penulisan artikel ini metode penelitian data yang dipakai penulis yakni metode kuantitatif lewat wawancara langsung (*keyinformant-interviewing*) sebagai sumber primer. Wawancara dilakukan bersama para narasumber secara mendalam tanpa pedoman kaku dan percakapan mengalir secara alami seperti diskusi biasa agar peneliti bisa menggali informasi sedalam mungkin. Ada 4 guru sebagai narasumber yang telah diwawancarai oleh peneliti yang masing-masing diberi inisial Q1 hingga Q4 secara berurutan. Identitas para narasumber ditampilkan di tabel di bawah ini.

**Tabel 1.** Profil Narasumber.

| No (Inisial) | Nama Narasumber          | Profesi                      |
|--------------|--------------------------|------------------------------|
| 1 (Q1)       | Ibu Yosephina Bela, S.Pd | Kepala Sekolah SDI Gere      |
| 2 (Q2)       | Ibu Rikarda Ani, S.Pd    | Pengelola MBG/Orang tua wali |
| 3 (Q3)       | Sr. Maria Imakulata, CSV | Wali Kelas V                 |
| 4 (Q4)       | Ibu Agnes Sumianti, S.Ag | Guru Agama                   |

Dalam kegiatan wawancara, penulis berusaha menyandingkan pembicara yang lebih bisa dipahami untuk melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak menyulitkan. Oleh karena itu, peneliti menyiapkan sejumlah pertanyaan yang bisa diberikan sesuai dengan situasi dan kondisi di tempat penelitian. Penulis juga menggali informasi dari studi kepustakaan dari sumber buku atau data jurnal dan artikel valid, dokumen-dokumen, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan tema tulisan yang diangkat penulis. Sumber-sumber literatur tersebut digunakan sebagai sumber sekunder yang memperkaya artikel ini.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Sekilas SDI Gere dan Akseptasi Program MBG

##### *Sekilas SDI Gere*

SD Inpres Gere adalah salah satu satuan pendidikan dasar yang berlokasi di Dusun Gere, Desa Koting A, Kecamatan Koting, Maumere-Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sekolah ini melayani pendidikan dasar dengan fokus pada pengembangan potensi siswa dan terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), yang seringkali melayani siswa dengan kebutuhan khusus seperti kesulitan belajar (Ditjen PAUD Dikdasmen). Menurut data akreditasi terbaru pada Mei 2026 sekolah ini berstatus akreditasi C. Ditinjau dari data profil SDI Gere terbaru (April 2026) dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), jumlah siswa SDI Gere sebanyak 90 orang anak. Sedangkan total jumlah guru (11 orang) dan rombongan belajar (6 orang) ada 17 orang. Sekolah ini secara resmi didirikan pada 1 Maret

1984. Menurut Q1, setelah gedung dan fasilitas awal tersedia, sekolah ini mendapatkan izin operasional resmi pada 1 Desember 1984 dengan nomor SK 179 Tahun 1984. Sejak awal berdiri, sekolah ini berstatus sebagai sekolah negeri di bawah naungan pemerintah.

### ***Akseptasi Program MBG***

Program MBG adalah inisiatif nasional yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia mulai awal tahun 2025 untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Program ini merupakan misi Presiden Prabowo bagi para pelajar, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui demi mengintensifkan fokus belajar, kesehatan, dan aspek intelektual. Tujuan utama program MBG adalah meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui perbaikan gizi untuk menekan angka stunting. Dalam ranah pendidikan, tujuan utama program ini ialah untuk meningkatkan fokus belajar dan aspek intelektual para pelajar serta pemenuhan gizi.

Penyediaan makanan sehat harian di area sekolah umumnya melalui unit pelayanan gizi yang melibatkan dapur umum setempat. Dapur tersebut dikenal sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan gizi atau disingkat SPPG. Lazimnya menu standar mencakup nasi, makanan pendamping, sayuran, buah-buahan, dan susu. Dalam aplikasinya ada dua kategori makanan, yakni "menu basah" dan "menu kering". "Kalau menu basah ni yang ada nasi, ada lauknya. Kalau menu kering tu yang ada roti, telur susu...", demikian pernyataan Q1. Sebagaimana dinyatakan Q2, menu kering disediakan hanya satu hari, yakni hari setiap hari sabtu. Sedangkan menu basah disediakan di hari senin hingga jumat.

Menurut pengakuan para narasumber, mereka terbuka menerima setiap program dari pemerintah yang berandil positif bagi pendidikan. Mereka menilai program MBG juga merupakan bagian dari cara negara memajukan atau meningkatkan mutu pendidikan. "Sejauh itu merupakan program pemerintah yang baik untuk sekolah kami, kami siap terima. Kalo uangnya mau dialihkan untuk program lain demi kebaikan pendidikan, ya syukur," demikian kata Q1. Pihak sekolah juga tidak berharap MBG mesti wajib diprogramkan. Jika program tersebut dihentikan dan anggarannya dialihkan untuk kepentingan pendidikan lainnya, hal tersebut itu dianggap baik pula.

### **Dualitas Perspektif Hak Individu Ockham terhadap Akseptasi Program MBG di SDI Gere**

Bagi Ockham, realitas yang paling nyata dan memiliki keberadaan yang sesungguhnya adalah individu itu sendiri. Oleh karena itu, setiap orang memiliki nilai dan martabat yang absolut yang tidak boleh dikorbankan atau diabaikan hanya demi kepentingan bersama yang dipaksakan. Landasan pemikiran ini semakin diperkuat dalam kajian filsafat hukum dan politik.

Ockham menegaskan bahwa fungsi utama dari hukum dan negara adalah untuk melindungi dan menjamin hak-hak tersebut, bukan untuk membatasi atau bahkan menghapusnya. Negara hadir sebagai pelindung hak warga, bukan sebagai pemilik hak atas hidup mereka. Jika sebuah kebijakan atau aturan melanggar hak dasar individu, maka aturan tersebut kehilangan landasan keadilannya (Marsela et al., 2024). Pendapat ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Ronitawati et al. (2022) dalam bukunya, bahwa hak asasi manusia bersifat universal, abadi, dan tidak dapat dicabut karena merupakan anugerah. Dengan demikian, penghormatan terhadap hak individu bukan sekadar masalah etika sosial biasa, melainkan merupakan kewajiban moral dan hukum yang mutlak harus dipenuhi oleh setiap sistem pemerintahan.

Relevansi pemikiran Ockham menjadi sangat nyata dan aktual ketika dikaitkan dengan kebijakan publik, khususnya program MBG. Dalam perspektif filsafat hak individu, pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan yang bergizi dan sehat adalah prasyarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Seseorang tidak dapat dikatakan benar-benar bebas, tidak dapat berpikir secara jernih, dan tidak akan mampu mengembangkan potensi dirinya secara maksimal jika kondisi fisiknya lemah atau kekurangan gizi (Asni et al., 2024). Hal ini dapat dibenarkan dengan pernyataan dari Q3 yang menyatakan bahwa, dengan adanya program MBG secara tidak langsung negara memberikan asupan gizi yang cukup untuk masa depan anak. “Memang sekarang belum terasa dampak MBG ini, tapi ini kan program jangka panjang jadi efeknya nanti dirasakan kemudian hari.” Oleh sebab itu, program MBG dapat dipandang sebagai wujud nyata dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak kodrati warganya, terutama bagi anak-anak di usia sekolah.

Dalam konteks akseptasi program di SDI Gere, para muridlah yang menjadi sasaran penerima. Merujuk pada pandangan hak individu Ockham, sebagai individu yang bermartabat para murid memiliki hak yang melekat dalam diri yang tidak dapat dicabut atau dipaksakan. Penyediaan MBG merupakan program yang “dipaksakan” pemerintah yang menysasar para pelajar. Walaupun tujuan program MBG berorientasi positif, program tersebut berpotensi kontradiksi dengan hak individu Ockham. Dalam hal ini, negara telah gagal menjaga keadilan dan mencederai hak individu para warganya (pelajar). Mestinya negara mengumpulkan aspirasi “persetujuan” atau jejak pendapat dari para sasaran penerima terlebih dahulu sebelum memutuskan apakah program tersebut layak dilaksanakan atau tidak. Untuk meningkatkan kreativitas dan mutu pendidikan, negara tidak perlu membuat program dan standarisasi berlebihan tanpa mengkaji kelebihan dan kekurangannya secara mendalam lebih dahulu (Sari et al., 2024).

Para pelajar setingkat SD belum memiliki pola pikir yang logis dan kritis sehingga perlu ada peibatan orang tua atau wali untuk menggantikan perannya (Purwianto et al., 2022). Oleh karena itu, pemerintah dapat menampung aspirasi dari para orang tua atau wali murid. Q2, orang tua wali sekaligus pengelola MBG di SDI Gere, mengaku tidak mempersoalkan kebijakan pemerintah memprogramkan MBG. Menurutnya sejauh program tersebut berorientasi kepada suatu kebaikan, ia menerima program tersebut. Meski merupakan kebijakan sepihak tanpa melibatkan atau mendengarkan persetujuan pihak sasaran, program ini bertujuan meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan para pelajar.

### **Relevansi Pemikiran Ockham Dalam Dunia Pendidikan**

Penerapan filsafat Ockham dalam konteks dunia pendidikan membawa perubahan besar dalam cara pandang terhadap siswa. Seorang siswa tidak boleh lagi dipandang sebagai objek pasif yang hanya menerima materi pelajaran atau sekadar menaati peraturan, melainkan harus diposisikan sebagai subjek aktif yang memiliki hak, keinginan, dan potensi yang unik (Shofi et al., 2025). Setiap kebijakan atau program yang dibuat di lingkungan sekolah, termasuk pelaksanaan program MBG, haruslah berorientasi pada nilai kemanusiaan dan pelayanan terhadap kebutuhan individu siswa. Prinsip kesederhanaan berpikir yang terkenal dengan istilah *Ockham's Razor* juga mengajarkan agar metode pembelajaran dan aturan sekolah dibuat sesederhana mungkin namun tetap efektif, langsung menyentuh inti permasalahan, dan tidak berbelit-belit sehingga mudah dipahami serta manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh siswa (Syamsuri & Nazir, 2021).

Namun demikian, tantangan yang sering muncul dalam praktik di lapangan adalah bagaimana cara menyeimbangkan antara kepentingan umum atau ketertiban sekolah dengan hak-hak pribadi setiap siswa. Aturan dan disiplin sekolah memang sangat diperlukan untuk menjaga kondusivitas lingkungan belajar, namun penerapannya tidak boleh terlalu kaku hingga menghilangkan sisi humanisnya. Dalam pelaksanaan program-program nasional, sering kali ada kecenderungan untuk melakukan standarisasi secara berlebihan, yang pada akhirnya justru dapat membatasi kebebasan berekspresi dan kreativitas anak didik (Isari et al., 2025). Oleh karena itu, pendekatan yang humanis dan fleksibel sangat diperlukan agar aturan tetap berjalan tetapi hak serta kenyamanan siswa tetap terjaga dengan baik (Notoatmodjo, 2010). Terkait kehadiran siswa dan antusiasme belajar siswa sudah terbentuk sejak lama. Program MBG memberikan dampak positif namun dalam skala yang bertahap dan tidak drastis karena dasar kedisiplinannya sudah ada sebelum adanya program MBG. Hal ini dipertegas oleh Q5 yang menyatakan bahwa, perubahan positifnya ada, tapi hanya sekitar satu persen saja. “Sebelum

ada program MBG pun anak-anak disini sudah rajin dan hadir terus ke sekolah, jadi tidak ada lonjakan yang terlalu signifikan. Ya...Sekitar satu persen saja.”.

Program MBG tidak terlepas dari peran guru dan pihak sekolah sebagai penerima manfaat program tersebut. Mereka tidak hanya bertugas sebagai pelaksana instruksi program, tetapi juga harus memahami filosofi mendalam di balik program tersebut sebagai bentuk nyata dari perlindungan terhadap hak anak. Pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang mampu menampung segala keragaman dan memberikan perlakuan yang adil bagi setiap individu, tanpa membedakan latar belakang ekonomi, sosial, maupun kondisi fisik tertentu (Riski Rahayu et al., 2023). Dukungan dari para pendidik sangat penting demi kelncaran program ini. Namun, tanggung jawab profesional menuntut mereka untuk tetap kritis dan memastikan bahwa apa yang dibagikan kepada siswa harus benar-benar berkualitas dan aman. Hal ini sejalan dengan pendapat Q3 yang menyatakan bahwa, para guru mendukung penuh program ini karena tujuannya sangat baik untuk anak-anak. Tapi tentu saja kami tetap mengecek dan memastikan makanannya bersih, sehat, dan layak dikonsumsi sebelum dibagikan ke siswa. Dengan demikian, filsafat yang digagas oleh William Ockham memberikan pesan yang sangat jelas bahwa keberhasilan sebuah program pendidikan tidak boleh hanya diukur dari target administrasi atau kuantitas data, melainkan harus dilihat dari sejauh mana program tersebut mampu menghargai, melindungi, dan memberdayakan hak-hak dasar setiap individu yang ada di dalamnya (Darmawan, 2025).

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Penerimaan program MBG di SDI Gere tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknis (rasa makanan atau jadwal), tetapi juga oleh seberapa besar program tersebut menghargai kebebasan murid dan orang tua. Apabila subjek merasa terlibat, penerimaan akan meningkat. Terdapat konflik antara tujuan baik pemerintah (meningkatkan gizi secara menyeluruh) dengan hak individu untuk memilih konsumsinya sendiri. Dalam pandangan Ockham, program ini hanya dinilai etis jika tidak mengubah manusia (siswa) menjadi sekadar objek penerima bantuan. Penelitian menemukan bahwa hak individu di SDI Gere terwujud dalam bentuk "hak untuk memilih" atau "hak untuk menolak". Akseptasi yang tulus muncul saat individu mengakui keuntungan dari program tersebut tanpa merasa bahwa otonomi pribadinya atas tubuh dan pilihannya diambil alih oleh otoritas pusat.

Penyelenggara program MBG di SDI Gere sebaiknya menghindari pendekatan *top-down* (dari atas ke bawah). Diperlukan forum diskusi atau penelitian minat siswa dan orang tua agar pilihan menu dan cara distribusi sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing, bukan hanya sekadar rata-rata. Dengan memperhatikan perhatian Ockham terhadap keunikan individu, program harus dapat memenuhi kebutuhan gizi spesifik (misalnya alergi, larangan agama, atau preferensi lokal) untuk menghindari penerapan identitas gizi seragam yang dapat melanggar hak individu. Informasikan kepada siswa bahwa program ini adalah hak yang mereka terima untuk memberdayakan diri mereka, bukan hanya "sumbangan" yang membuat mereka berutang budi secara politik. Ini melindungi harga diri individu sesuai dengan prinsip Ockham. Sebaiknya, penelitian selanjutnya melakukan perbandingan akseptasi di SDI Gere dengan lembaga pendidikan lain yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda, guna mengamati apakah "Lensa Ockham" ini berlaku secara universal atau dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal (komunal vs individualitas).

## DAFTAR REFERENSI

- Askar, M. wahyudi, Fikri, B., Dermawan, J., Muhammad, G. D., & Setiadi, B. M. (2025). *Pak presiden, kami punya ide lain*. 12.
- Asni, N., Demmalewa, J. Q., & Darwis, B. (2024). Sistem Penyelenggaraan Makanan pada Keluarga Nelayan yang Memiliki Anak Balita di Kepulauan Masaloka Raya Kabupaten Bombana. *Jurnal Gizi Ilmiah*, 11(3), 1–8.
- Badan Gizi Nasional. (2025). *Laporan program Makan Bergizi Gratis (MBG): Menggerakkan Ekonomi Lokal Melalui Pemanfaatan Bahan Pangan*. <https://www.bgn.go.id/news/berita/mbg-jadi-penggerak-ekonomi-dan-kedaulatan-pangan>
- Darmawan, A. R. P. (2025). Program Mbg : Antara Hak Anak Atas Gizi Dan Kewajiban Negara Terhadap Warga Mbg Program : Between Children ' S Rights To Nutrition and the. *SIGARUDA JOURNAL*, 1(2), 223–230.
- Handoyo, M. F., Sartika, D., & Pratama, M. A. (2024). Konsep Hak Alamiah William Ockham. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(2), 1–25. <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>
- Hastuti, R., & Mahardika, H. A. (2025). Implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah : Tinjauan Literature terhadap Tantangan Tata Kelola dan Implikasi Kebijakan. *In Pro Health Jurnal Ilmiah Kesehatan* (Vol. 16, Issue 2026).
- Isari, A., ZD, N. N. R., Candra S, M. A., & Hidayat, A. F. (2025). Peran Guru sebagai Fasilitator dalam Meningkatkan Kreativitas Anak Sekolah Dasar. *TSAQOFAH*, 5(4), 3817–3827. <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v5i4.6557>
- Jubi. (2025). *Ribuan Pelajar di Deiyai Demo Tolak Makan Bergizi Gratis*. <https://jubi.id/meepago/2025/ribuan-pelajar-di-deiyai-demo-tolak-makan-bergizi-gratis/>

- Keladu, Y., Darling, D., Sugar, F., & Armansi, A. (2026). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Era Kepemimpinan Prabowo-Gibran dalam Perspektif Amartya Sen. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 18(1), 1–8. <https://doi.org/10.32734/politeia.v18i1.20855>
- Kiftiyah, A., Palestina, F. A., Abshar, F. U., & Rofiah, K. (2025). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Dinamika Sosial – Politik. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 5(1), 101–112. <https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.726>
- Marsela, S., Chintya, ;, Oktavia, I., Windi, I. ;, Maelani, U., Mohammad, I. ;, & Pratama, A. (2024). Konsep Hukum William Ockham. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(2), 1–25. <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>
- Notoatmodjo. (2010). *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Rineka Cipta.
- Purwianto, A., Mahmudah, F. N., & Nasaruddin, D. M. (2022). Pelibatan Orang Tua dalam Upaya Meningkatkan Capaian Belajar Siswa Kelas VI SD Unggulan Aisyiyah Bantul Tahun Pelajaran 2021/2022 di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 16267–16275.
- Riski Rahayu, D., Elsa Fadillah, A., Lestari, E., Amanda Faradila, S., & Fitriana, D. (2023). *Peran Orang Tua dalam Proses Bimbingan dan Konseling Anak*. 4(2). [http://ejournal.undhari.ac.id/index.php/de\\_journal](http://ejournal.undhari.ac.id/index.php/de_journal)
- Ronitawati, P., Ayupradinda, B. F., Sitoayu, L., Sa'pang, M., & Nuzrina, R. (2022). Perencanaan Menu, Preferensi Menu, Terhadap Biaya Sisa Makanan dan Zat Gizi Yang Hilang. *Jurnal Nutrisia*, 24(1), 21–28. <https://doi.org/10.29238/jnutri.v24i1.245>
- Sari, M. P., Mardhiah, R., & Darmayanti, M. (2024). Upaya meningkatkan kreativitas siswa sekolah dasar: A systematic literature review dan bibliometric analisis. *DWIJA CENDEKIA: Jurnal Riset Pedagogik*, 8(3), 401. <https://doi.org/10.20961/jdc.v8i3.86831>
- Shofi, A., Padilah, C. K., Laborahima, M. J., Nurhalimah, S., Aziz, A., & Artikel, I. (2025). Pendidikan Inklusi Sebagai Wujud Keadilan Pendidikan. *Qolamuna*, 2(1), 2025.
- Syamsuri, S., & Nazir, N. (2021). *Filsafat Pendidikan: Prinsip dan Praktik Pembelajaran Sederhana*. Prenada Media.
- Theo, Y. (2023). *Diet Sebagai Keseimbangan Hidup Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara* (Vol. 09, Issue 04).